



# Buletin Parlementaria

Nomor 1068/I/IX/2019 • September 2019

## Bangun Indonesia Unggul Melalui Keterbukaan Parlemen



9 772614 339005



**3 Agus Hermanto**  
Ajak Negara  
ASEAN Pertahankan  
Perubahan Iklim



**6 Delegasi DPR Kembali**  
Perjuangkan Krisis  
Kemanusiaan Rohingya

# Bangun Indonesia Unggul Melalui Keterbukaan Parlemen

**D**ewan Perwakilan Rakyat/ Majelis Permusyawaratan Perwakilan (DPR/MPR) Republik Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2019 ini merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-74. Pada peringatan HUT DPR RI tahun ini, diselenggarakan Rapat Paripurna dengan mengambil tema ‘Membangun Indonesia Unggul Melalui Keterbukaan Parlemen’.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menyampaikan Pidato Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2018-2019 sekaligus memimpin Rapat Paripurna DPR RI dan HUT ke-74 DPR RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).

“Pada peringatan HUT kali ini, DPR mengambil tema “Membangun Indonesia Unggul melalui Keterbukaan Parlemen”. Tema tersebut merupakan refleksi dari pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan unggul di berbagai bidang kehidupan, termasuk sumber daya manusia saat ini dan masa yang akan datang melalui keterbukaan parlemen,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsuet ini menjelaskan dalam upaya keterbukaan parlemen, secara konsisten DPR RI terus mengukung program ‘Parlemen Modern’ yang sudah dimulai sejak 2015 hingga sekarang. “Salah satu bentuk dari program ‘Parlemen Modern’ adalah *Open Parliament* yang bertujuan memperkuat konsep ‘Parlemen Modern’ yang telah lama digagas DPR,” tandas Bamsuet.

Lebih lanjut, ia menuturkan dengan adanya *Open Parliament*, inisiatif kolaborasi dan partisipasi masyarakat di DPR semakin terbuka, yang pada



Pimpinan DPR RI menyerahkan Laporan Kinerja DPR RI Tahun 2018-2019 kepada Wakil Ketua DPD RI, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan sejumlah Pimpinan Lembaga Negara. Foto: Oji/HR

akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan representasi masyarakat. Tak hanya itu, komitmen DPR RI dalam mendorong keterbukaan informasi publik juga dibuktikan dengan hadirnya Parlemen Indonesia dalam berbagai forum internasional.

“DPR RI terus berkomitmen mendorong inisiatif *Open Parliament*. Kehadiran DPR pada dua forum *Global Legislative Openness Conference* di Ukraina pada April 2017 dan *Open Government Summit* di Georgia pada Juli 2018 merupakan bentuk komitmen Parlemen dalam mendorong keterbukaan informasi publik,” pungkas Bamsuet.

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini mengungkapkan, dalam perjalanan menata kelembagaan, DPR RI selalu berusaha untuk mendekati diri kepada masyarakat. Untuk itu, DPR RI sudah memulai program Parlemen Modern sejak 2015 hingga sekarang.

“Sejumlah capaian telah berhasil diraih, akan tetapi konektivitas antara DPR dengan masyarakat yang menjadi konstituen masih perlu ditingkatkan,

untuk mendorong partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dengan target *audience* yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi informasi,” tegas Bamsuet.

Sebelum Rapat Paripurna berakhir, Pimpinan DPR RI menyerahkan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2018-2019 kepada Wakil Ketua DPD, mantan Wakil Ketua DPR RI, perwakilan Mahkamah Konstitusi, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan. HUT ke-74 ini juga dimeriahkan dengan potong tumpeng di selasar Ruang Rapat Paripurna, dan berbagai kegiatan guna semakin mendekatkan DPR RI kepada kepada rakyat, sekaligus sebagai wujud keterbukaan parlemen.

“Dalam rangkaian HUT ke-74, DPR menggelar berbagai kegiatan guna mendekat antara lain, Gowes Sehat DPR Bersama Rakyat, *Stand Up Comedy* Kritik terhadap DPR, Lomba Panjat Bambu Betung, Lomba Mewarnai untuk Anak-Anak, Pesta Rakyat Dangdut Pro-Rakyat, Pameran Foto Warna-Warni Parlemen dan Lomba Burung Berkicau,” ujar Bamsuet. ■ pun/es

# Agus Hermanto Ajak Negara ASEAN Pertahankan Perubahan Iklim

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang)

Agus Hermanto mengajak negara-negara di ASEAN, terutama yang tergabung dengan *Asean Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) untuk mempertahankan perubahan iklim dengan terus membatasi temperatur dunia sesuai dengan *Paris Climate Conference* (COP21).

“Kalau kita lihat, AIPA ini masih bermuara dari *Sustainable Development Goals* (SDGS) yang memang semua negara sepakat mempertahankan perubahan iklim menuju energi bersih,” ungkap Agus, usai mengikuti pembukaan *40th General Assembly of AIPA* di Bangkok, Thailand, Senin (26/8).

Menurut legislator dapil Jawa Tengah I ini, apa yang sudah dilakukan di Indonesia sudah tepat. Yakni, Indonesia sudah menuju energi yang bersih dan pelan-pelan meninggalkan fosil menuju energi terbarukan, bahkan ke depan berpikir energi baru.



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Foto: Jaka/HR

”

**...NEGARA ANGGOTA ASEAN HARUS MENGAMBIL LANGKAH NYATA DAN BEKERJASAMA MENGATASI PERMASALAHAN SAMPAH MARITIM.**

Agus juga menyoroti tentang sampah maritim di kawasan ASEAN yang sudah sangat mencemari lingkungan laut yang sebelumnya juga disorot oleh Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha karena Thailand terkena langsung dampak pencemaran laut. “Perdana Menteri Thailand mengimbau negara-negara ASEAN fokus mengatasi sampah maritim, karena dari sampah-sampah ini akan banyak menimbulkan akses daripada perubahan iklim,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Thailand juga mengatakan, Thailand sebagai tuan rumah AIPA ingin mengatasi isu lingkungan hidup tersebut. Dalam KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, para pemimpin negara setuju mengadopsi Deklarasi Bangkok untuk mengatasi sampah laut di kawasan Asia Tenggara.

“Kami menyadari bahwa negara anggota ASEAN harus mengambil langkah nyata dan bekerjasama mengatasi permasalahan sampah maritim. Ini menjadi keprihatinan kita bersama, mengurangi sampah plastik, sampah laut dan maritim menjadi kepentingan kita bersama,” jelasnya sembari mengajak agar memperkuat kerja sama kawasan dalam melindungi lingkungan hidup dan berharap AIPA dapat menindaklanjuti deklarasi tersebut untuk kebaikan bersama. ■ jk/es



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**

Eka Hindra

**SEKRETARIS REDAKSI**

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

**ANGGOTA REDAKSI**

Agung Sulistono, S.H., Rizka Ainiandya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullil, Purno Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Rihan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

**FOTOGRAFER**

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,  
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,  
Gerald Opie.

**ANALIS MEDIA**

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,  
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

**INFOGRAFIS**

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,  
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

**ADMINISTRASI**

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**PHOTOGRAFER ART**

Friederick Munchen

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito

**STAF PRODUKSI**

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO**

**DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Anggota Parlemen Terpilih Dibekali Informasi Sistem Ketatanegaraan

**P**rogram Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota DPR RI dan DPD RI bertujuan memberikan informasi penting tentang peran dan tujuan DPR RI-DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tidak hanya itu, program orientasi tersebut juga membekali calon anggota terpilih dengan landasan dasar tentang praktik serta prosedur di DPR RI dan di DPD RI.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menjadi pemateri pada acara Program Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, di Birawa Assembly Hall, Bidakara, Pancoran, Jakarta, Senin (26/8).

“Program orientasi ini merupakan program yang secara rutin kita lakukan setiap tahunnya, dengan tujuan memberikan informasi tentang peran dan tujuan DPR RI-DPD RI dalam sistem ketatanegaraan kita. Yang kedua, membekali calon anggota terpilih dengan landasan dasar tentang praktik serta prosedur di DPR RI dan di DPD RI. Yang terakhir, memberikan info terkini tentang perkembangan terbaru di DPR RI dan DPD RI,” ujar Bamsuet, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, program seperti ini lazim dilakukan oleh berbagai parlemen di dunia dengan sebutan *induction program*, namun program orientasi yang diselenggarakan Parlemen Indonesia memiliki kelebihan karena bekerjasama dengan lembaga pertahanan.

“Sehingga, bekal pengetahuan akan

bertambah dan diperkuat dengan wawasan kebangsaan. Setelah mengikuti program orientasi ini diharapkan segera beradaptasi secara cepat dan berpartisipasi secara efektif dalam proses kegiatan kedewanan nantinya,” tutur Bamsuet.

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini menegaskan, Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2019-2024 ke depan bisa terus bersinergi membangun bangsa, dengan menghasilkan berbagai regulasi yang diharapkan rakyat, penetapan anggaran yang tepat sasaran dan pengawasan yang super ketat.

Program orientasi yang akan dilaksanakan 10 hari ke depan, bukan hanya menyajikan ilmu pengetahuan

saja, namun juga ilmu pengertian. Karena bila tidak diimbangi dengan ilmu pengertian, terkadang membuat lupa dan merasa pintar sendiri sehingga muncullah intoleransi, ego sektoral dan sebagainya.

“Lima tahun ke depan kita terus bersinergi membangun bangsa ini menghasilkan berbagai regulasi yang diharapkan rakyat, penetapan anggaran tepat sasaran dan pengawasan yang super ketat. Bukan hanya ilmu pengetahuan, kita semua juga memerlukan ilmu pengertian. Karena, kadang kita lupa, kita merasa pintar tapi kita minus di ilmu pengertian sehingga muncul lah intoleransi, ego sektoral dan sebagainya,” pungkas Bamsuet. ■ pun/es



Suasana Program Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota DPR RI dan DPD RI. Foto: Azka/HR



Fahri Hamzah menyerahkan 'Blueprint' Implementasi Reformasi DPR RI kepada Ketua DPR RI. Foto: Oji/HR

# Fahri Hamzah Serahkan *Blueprint* Implementasi Reformasi DPR RI

**R**apat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyetujui laporan yang disampaikan Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI Fahri Hamzah. Dalam kesempatan tersebut, Fahri menyerahkan *Blueprint* Implementasi Reformasi DPR RI beserta lampiran 6 paket Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Perwakilan.

“Saya atas nama Ketua Tim Implementasi Reformasi menyerahkan buku *Blueprint* Implementasi Reformasi DPR RI beserta lampiran 6 paket RUU Lembaga Perwakilan untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Anggota DPR RI periode 2019 – 2024,” ucap Fahri di hadapan Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).

Dalam laporannya, Fahri menyampaikan bahwa Tim Implementasi Reformasi DPR RI

dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor 12/DPR RI/II/2014-2015 tanggal 9 Februari 2015 berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Februari 2015. Anggota Tim berasal dari seluruh fraksi di DPR RI dan langsung bekerja sejak hari pertama dilantik dengan melakukan penguatan DPR RI, tidak hanya terkait kelembagaan tetapi juga sistem kerja dalam melakukan artikulasi dan agredasi kepentingan rakyat.

“Anggota Dewan akan diberikan dua buah dokumen, dokumen pertama adalah dokumen *Blueprint* Reformasi DPR RI yang diserahkan kepada Ketua DPR untuk diteruskan kepada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan kepemimpinan Anggota DPR yang akan datang sebagai hadiah dari Anggota Dewan periode yang sekarang ini,” ujarnya.

Sedangkan dokumen yang kedua adalah 6 draf RUU yang merupakan

alat bagi sebuah pembentukan kelembagaan Parlemen Modern di masa yang akan datang, sambungnya. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menjelaskan, enam draf tersebut terdiri dari 4 RUU pecahan dari UU MD3, yakni RUU MPR, RUU DPR, RUU DPD, dan RUU DPRD. Sedangkan RUU yang kelima adalah RUU tentang Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan, dan yang terakhir RUU tentang Etika Anggota Lembaga Perwakilan.

Dikatakan Fahri, penguatan *Political Appointee* adalah kepada lembaga yang sifatnya tidak permanen. Namun ada sistem pendukung yang sifatnya permanen, dalam hal ini terbentuknya Badan Keahlian DPR yang mendampingi Setjen DPR sebagai pendukung dan dapur pemikiran.

“Keduanya menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita ke depan adalah membangun Pusat Pendidikan Legislatif. Selama ini di Indonesia tidak ada Pusat Pendidikan Legislatif. Oleh karenanya ada keharusan untuk kita membuat Pusat Pendidikan Legislatif agar seluruh Anggota Legislatif di seluruh Indonesia bisa di *training* sebagai wakil rakyat,” tandas legislator dapil NTB itu.

Fahri menegaskan, ada dua pekerjaan rumah ke depan yang terdapat dalam rencana yang ada di dalam RUU bagi keanggotaan dewan yang akan datang, yakni kemandirian kamar legislatif yang hingga kini belum tercapai secara penuh, dan masalah pembangunan kawasan Parlemen.

“Seharusnya parlemen disertai dengan tempat-tempat untuk menyatakan aspirasi rakyat. DPR juga seharusnya mempunyai *visitor center* yang baik yang mengelola perpustakaan besar dan mengelola museum yang akan menjadi perambang bagi sejarah bangsa untuk mengingat sejarah dan tradisi demokrasi bangsa ini, selain pusat-pusat kegiatan lainnya yang merupakan pusat kegiatan masyarakat,” pungkasnya. ■ dep/es

# Delegasi DPR Kembali Perjuangkan Krisis Kemanusiaan Rohingya



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Foto: Jaka/HR

**D**elegasi DPR RI untuk ketiga kalinya kembali memperjuangkan isu krisis kemanusiaan Rohingya untuk dijadikan resolusi dalam rapat Komite Eksekutif ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-40 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Usulan tersebut mengundang perdebatan panjang dalam sidang Komite Eksekutif AIPA. Myanmar kembali menolak dengan tegas isu krisis Rohingya masuk ke dalam pembahasan Sidang AIPA. Sementara sejumlah negara lainnya, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Singapura, lebih bersikap diam dan menyerahkan kepada mekanisme konsensus.

“Hari ini, 25 Agustus 2019, menandakan tepat dua tahun peristiwa genosida dan eksodus ratusan ribu orang Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh. Meski demikian, hingga kini situasi yang dialami para pengungsi Rohingya masih tak menunjukkan perbaikan. Upaya repatriasi yang sudah direncanakan sejak tahun lalu juga belum menunjukkan perkembangannya. Itu sebabnya, kami kembali mengajukan draf resolusi atas krisis kemanusiaan

yang terjadi di Myanmar. Resolusi ini harus menjadi bagian penting dari hasil Sidang Umum AIPA ke-40. Kita di ASEAN tak boleh menutup mata atas masalah Rohingya,” jelas Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat mengikuti rapat Komite Eksekutif AIPA ke-40 di Bangkok, Thailand, Minggu (25/8).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu memastikan, sikap Delegasi Parlemen Indonesia pada tahun 2019 ini masih sama dengan sikap pada tahun 2017 dan 2018 lalu, bahwa krisis Rohingya harus masuk ke dalam agenda pembicaraan Komisi Politik AIPA. Sebagai forum parlemen tertinggi di ASEAN, AIPA tak boleh mengabaikan isu kemanusiaan Rohingya yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya. Penolakan AIPA terhadap pembahasan isu Rohingya, menandakan forum AIPA tak memiliki komitmen terhadap perlindungan kemanusiaan dan perdamaian di kawasan.

“Kekhawatiran Myanmar dan sejumlah negara lainnya terhadap draf resolusi yang kami ajukan, karena dinilai mencampuri urusan internal anggota ASEAN lainnya, jelas tak beralasan. Draft resolusi ini kami ajukan untuk mendukung Myanmar dalam memulihkan perdamaian dan stabilitas, serta untuk memberi bantuan dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Saya sudah meninjau langsung para pengungsi di kamp Kutupalong Bangladesh dan mereka hidup sangat menderita. Lebih dari 1 juta pengungsi dan mereka

membawa cerita mengerikan tentang pengusiran, pemerkosaan bahkan pembantaian,” jelas Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, AIPA sebagai forum parlemen yang paling dekat dengan sumber krisis di Rohingya, semestinya menjadi forum parlemen yang paling aktif dalam merespon krisis tersebut. Sebab, dalam forum parlemen yang lebih luas, seperti dalam Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-139 di St. Petersburg, Rusia, 2018 lalu, masyarakat internasional telah mengakui urgensi untuk mengatasi situasi itu melalui sebuah resolusi. Begitu juga halnya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah menerbitkan laporan serta resolusi atas situasi yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Sehingga, sangat aneh jika AIPA justru mengabaikan isu ini hanya karena hendak menjaga hubungan baik negara tetangga.

“Rapat Komite Eksekutif dibuka pukul 20.00 dan ditutup pukul 22.30. Dari 2,5 jam itu, sekitar 1,5 jam di antaranya berisi perdebatan mengenai draf resolusi yang diajukan parlemen Indonesia. Selama persidangan, kami melakukan persuasi kepada seluruh delegasi bahwa resolusi ini penting untuk dijadikan sebagai sikap AIPA. Sesudah berdebat alot, persidangan terpaksa dihentikan sementara agar terjadi mekanisme lobi. Namun, upaya itu gagal. Delegasi Parlemen Myanmar tetap tidak mau membuka diri untuk menerima dan membahas resolusi yang diusulkan Indonesia,” pungkas legislator dapil Jawa Barat V itu. ■ sf

# Indonesia–Iran Perkuat Hubungan Bilateral



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menerima kunjungan Komisi Yudisial dan Hukum Majelis Konsultatif Republik Islam Iran. Foto: Gerald/HR

**W**akil Ketua DPR RI Utut Adianto berharap Indonesia dan Iran dapat mengembangkan dan meningkatkan berbagai potensi hubungan bilateral, termasuk hubungan antar-parlemen dan masyarakat kedua negara. Di bidang ekonomi, kedua negara berkeinginan untuk memperluas hubungan perdagangan dan kerja sama lebih kuat dalam industri minyak atau *crude palm oil* (CPO).

“Delegasi Iran membuka peluang untuk melakukan ekspor CPO secara langsung tanpa pihak ketiga. Ini sangat positif dan akan saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan,” jelas Utut saat menerima kunjungan Delegasi Komisi

”

**...MENINGKATKAN KERJA SAMA DALAM UPAYA MEMBERANTAS TERORISME, RADIKALISME, PEREDARAN NARKOBA SERTA MEMBERIKAN GAMBARAN ISLAM SEBAGAI AGAMA YANG TOLERAN,**

Yudisial dan Hukum Majelis Konsultatif Republik Islam Iran di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).

Dalam pertemuan itu, lanjut Utut, Iran juga turut mengajak Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dalam memberantas radikalisme, terorisme dan peredaran narkoba. “Kami juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya memberantas terorisme, radikalisme, peredaran narkoba serta memberikan gambaran Islam sebagai agama yang toleran,” tuturnya.

Terakhir, legislator F- PDI Perjuangan itu mengundang Delegasi Iran untuk hadir dalam sidang *World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals* (WPFSD) ketiga yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, di Bali pada 4-5 September 2019 mendatang. ■ rmm/sf

# Legislator Tegaskan **Siap Bahas** RUU PSDN

**K**omisi I DPR RI dan Pemerintah siap membahas Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (RUU PSDN) untuk ketahanan nasional, mengingat lingkungan strategis Indonesia semakin dinamis karena meningkatnya rivalitas di antara negara-negara besar dan ancaman asimetris dari aktor bukan negara seperti terorisme, separatisme, penyelundupan barang, orang lintas batas negara dan serangan cyber.

“Hal ini perlu benar-benar disikapi dengan menyiapkan sistem pertahanan semesta yang memadai serta memaksimalkan sarana prasarana,” ungkap Anggota Komisi I DPR Muhammad Hidayat Nur Wahid saat membacakan pandangan Fraksi

”

**NANTINYA, SEMUA SUMBER DAYA NASIONAL NON-MILITER AKAN DIBERIKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELA NEGARA.**

PKS terkait RUU PSDN saat rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Kementerian Hukum dan HAM di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, Bangsa Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif di dalam membela negara serta secara tegas disebutkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam pasal tersebut ditegaskan kata sukarela, sehingga menurut Hidayat hal tersebut tidak bersifat mengikat.

“Nantinya, semua sumber daya nasional non-militer akan diberikan pendidikan dan pelatihan bela negara, sehingga komponen cadangan ini siap untuk mendukung pertahanan negara ketika terjadi ancaman militer. Keterlibatan warga sebagai komponen pendukung adalah hak sehingga sifatnya sukarela,” jelasnya. ■ rnm/er



Anggota Komisi I DPR Muhammad Hidayat Nur Wahid saat menyerahkan pandangan Fraksi PKS terkait RUU PSDN kepada Menteri Pertahanan. Foto: Arief/HR



# Pengadilan Pertanahan Urgen Masuk RUU Pertanahan



Suasana Rapat Konsultasi Tim Panja RUU Pertanahan Komisi II DPR RI dengan jajaran Mahkamah Agung RI, di Gedung MA. Foto: Puntho/HR

**P**anitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Komisi II DPR RI berpandangan, poin tentang Pengadilan Pertanahan urgen untuk dimasukkan dalam RUU Pertanahan. Namun, Ketua Panja RUU Pertanahan Herman Khaeron memastikan, hal itu akan dilakukan dengan mengelaborasi berbagai pandangan yang diberikan Mahkamah Agung (MA).

“Tentu harus mengelaborasi dengan berbagai hal yang disampaikan oleh MA, agar tidak bertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya,” ujar Herman usai memimpin Rapat Konsultasi Tim Panja RUU Pertanahan Komisi II DPR RI dengan jajaran Mahkamah Agung RI, di Gedung MA, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta

”

**...PASAL DALAM RUU  
PERTANAHAN ITU  
HARUS DITEMPATKAN  
DENGAN BAIK,  
SEHINGGA TIDAK  
BERTENTANGAN  
DENGAN PERATURAN  
PERUNDANG-  
UNDANGAN LAINNYA.**

Pusat, Rabu (28/8).

Dalam Rapat Konsultasi yang membahas seputar pasal-pasal khusus tentang pembentukan Pengadilan Pertanahan itu, MA memberikan

respon bahwa ada banyak pasal dan norma yang harus disinkronisasikan. Lebih lanjut, MA juga memberikan pandangan dari pasal dan norma yang sudah disepakati dalam Panja RUU Pertanahan, dimana ada banyak aspek yang jadi bahan pertimbangan.

Herman menambahkan, berbagai pasal dalam RUU Pertanahan itu harus ditempatkan dengan baik, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. “Tentunya, dalam rapat Panja selanjutnya akan kami tinjau kembali dan kemudian dielaborasi supaya betul-betul apa yang menjadi pandangan para hakim MA, akan menempatkan pasal-pasal yang tidak bertentangan dalam aplikasinya,” pungkas legislator Partai Demokrat ini. ■ pun/sf

## Amandemen UUD 1945 Dilakukan untuk Jawab Tuntutan Kebutuhan

**A**nggota DPR RI Sulaeman L Hamzah mengatakan, dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan yang ada saat ini, memang perlu dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945. Namun amandemen yang dilakukan itu hanya sebatas pada bagian-bagian yang dianggap masih kurang tepat saja.

“Situasi terkini kita tidak bisa bertahan dengan apa adanya. Oleh karenanya, dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan saat ini perlu dilakukan Amandemen UUD NRI 1945. Amandemen UUD 1945 memang dibutuhkan, tetapi tidak pada seluruh pasal. Hanya bagian per bagian saja yang dianggap sedikit mengganggu dan hal itu harus disempurnakan,” ucap Sulaeman sesaat sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).

Dalam hal-hal yang prinsip dan sangat mengganggu, amandemen diperlukan untuk tujuan menyempurnakan. Politisi F-NasDem itu menyampaikan, amandemen yang dilakukan pada waktu sebelumnya telah merubah beberapa hal, yang kemudian dalam perjalanan bangsa Indonesia justru dianggap sedikit terganggu. “Ini hanya menyangkut hal-hal yang teknis, namun kalau tidak dimulai, saya kira akan sangat mengganggu,” tegasnya.

Menanggapi pertanyaan apakah amandemen yang akan dilakukan tidak didomplengi maksud dan tujuan lain untuk kepentingan golongan atau pihak tertentu, Sulaeman menegaskan bahwa sekarang ini semua masyarakat dan elemen bangsa sedang tertuju kesini, tidak ada pihak yang bisa bermain-main lagi.



Anggota DPR RI Sulaeman L Hamzah. Foto: Oji/HR

“Kalau sebagai wakil rakyat masih mempunyai pikiran untuk bermain-main dan memiliki tujuan lain dari amandemen ini, saya kira bukan tempatnya dia disini. Kita berpikir besar untuk bangsa Indonesia. Bangsa ini harus besar dan kuat, dan semakin hari harus semakin solid untuk bersaing dengan negara-negara lain,” pungkasnya. ■ dep/es

## Legislator Minta Pertimbangkan Kata ‘Syariah’ Dalam IISP di Madura

**A**nggota Komisi V DPR RI Mohammad Idham Samawi berharap penggunaan kata syariah dalam rencana pembangunan *Indonesia Islamic Science Park*

(IISP) di Kabupaten Bangkalan, Madura sebagai Kawasan Ekonomi Syariah, agar dapat dipertimbangkan.

“Saya berharap kata-kata syariah dipertimbangkan lagi, karena khawatir akan menimbulkan pro dan kontra di kemudian hari,” ujar Idham saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Plt. Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Kepala Basarnas, Kepala BMKG di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (27/8).

Pada dasarnya, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini tidak mempermasalahkan tentang rencana pembangunan IISP tersebut. Namun ia khawatir penggunaan kata syariah, dikemudian hari akan menimbulkan pro kontra dan polemik di masyarakat. Oleh karenanya ia berharap hal tersebut dapat dipertimbangkan

kembali, meskipun mayoritas masyarakat sekitar merupakan umat muslim.

Ungkapan Idham tersebut menyusul laporan yang dibacakan oleh Plt. BPWS Danis H Sumadilaga terkait arahan perubahan kebijakan rancangan rencana kerja 2020. Dimana salah satunya tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor 602.1/12650/110/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Penetapan Perpres BPWS, bahwa Industri yang dapat dikembangkan di Madura salah satunya adalah *Indonesia Islamic Science Park* (IISP) di Kabupaten Bangkalan, Madura sebagai Kawasan Ekonomi Syariah seluas 101 hektar.

“Dengan dibangunnya kawasan tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjadi magnet bagi pasar syariah internasional. Hal ini sesuai dengan budaya masyarakat sekitar,” pungkasan Danis. ■ ayu/es



Anggota Komisi V DPR RI M. Idham Samawi. Foto: Kresno/HR

# Komisi VI Minta BPKS Perbaiki Manajemen Pengelolaan Kawasan Sabang

**K**omisi VI DPR RI menilai perkembangan pengelolaan Kawasan Sabang yang dilaksanakan Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang (BPKS) belum dapat dinikmati masyarakat Aceh. Untuk itu, BPKS diminta memperbaiki manajemen dan membuat *grand design* pengelolaan Kawasan Sabang.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Fadhlullah saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI dengan Kepala BPKS Razuardi Ibrahim dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, kinerja BPKS, serta tindak lanjut hasil laporan badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Perwakilan BPKS Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (22/8).

“Kami (Komisi VI) memberikan catatan masalah manajemen, ini harus ada komitmen baik dari pengawasan maupun pelaksanaan untuk kemajuan Sabang dan Aceh. Sehingga dengan adanya komitmen kita bersama mulai dari pengawasan dan pelaksanaan, ini akan menjadi penting,” kata politisi F-Gerindra itu.

Sebagai politisi dapil Aceh, Fadhlullah mengaku kecewa karena sejak pertama kali berdiri, BPKS dianggap belum memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat Aceh. Dengan perbaikan manajemen, diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPKS di masa depan. “Sekarang mari kita sama-sama mencari solusi. Bagi saya untuk keberhasilan BPKS ini, pertama perbaikan manajemen dan

keberpihakan anggaran,” tegasnya.

Ia menambahkan, Komisi VI DPR RI akan terus memperjuangkan agar bisa meningkatkan kinerja BPKS dalam mewujudkan kawasan Sabang menjadi kawasan niaga dan wisata terkemuka di dunia. Diungkapkan Fadhlullah, anggaran BPKS untuk tahun 2019 sebesar Rp 221 miliar, hingga bulan agustus 2019 baru terealisasi sebesar 36 persen.

“Jumlah anggaran ini (BPKS) lagi-lagi terkait dengan evaluasi kinerja sebelumnya, ini tidak akan tuntas dengan anggaran yang juga sedikit. Kita ingin lihat *grand design* Sabang ini mau seperti apa. Akan menjadi catatan kita, cara seperti apa dalam membenahi internal BPKS ini, kalau di dalamnya ada masalah, tidak akan tercapai keinginan-keinginan besar kita,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI lainnya Mustofa Assegaf mengatakan, selain perbaikan manajemen, ia juga mengusulkan agar

BPKS segera membangun bandara di Kawasan Sabang, hal ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dari dan menuju kawasan Sabang.

“Dalam kasus Sabang ini, selain perbaikan manajemen, juga peningkatan infrastruktur yang terpenting adalah bandara. Kalau bandara belum berfungsi saya kira akan sulit, apalagi kita berbicara skala nasional apalagi internasional,” saran politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Diketahui Kawasan Sabang adalah satu-satunya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia yang telah mempunyai dasar hukum tetap, Perpu Nomor 2 Tahun 2000 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berlaku hingga 70 tahun.

■ as/es



Pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKS beserta jajaran. Foto: Agung/HR

# Komisi VI Dorong Pengembangan Industri dan Wisata Batam

**A**nggota Komisi VI DPR RI Adang Daradjatun mendorong Kota Batam menjadi daerah industri dan wisata yang membanggakan bagi bangsa dan negara. Namun pihaknya menilai, kurangnya penyerapan anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dapat mengakibatkan penurunan kinerja BP Batam dalam melakukan pengembangan mengejar ketertinggalan Batam sebagai “Singapura-nya Indonesia”.

Pada tahun 2018 lalu, penyerapan anggaran BP Batam hanya mencapai 66,9 persen atau hanya sebesar Rp 1,4 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 2 triliun. “Ada beberapa hal yang sudah dituntaskan BP Batam, ada juga yang belum diselesaikan. Yang belum diselesaikan jadi masukan bagi Komisi VI dalam pembahasan dengan pemerintah pusat,” imbuh Adang saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam di Kota Batam, Kepulauan Riau, baru-baru ini.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, mengenai Pembangunan Batam 2025, ia menilai masih ditemukan adanya masalah. “Masih terjadi tumpang tindih peraturan daerah, adanya perjanjian-perjanjian kerja sama yang belum selesai. Contohnya antara Garuda dan Lion yang masih belum bisa dijelaskan apa yang diperoleh oleh Batam,” imbuh Adang sembari mengatakan bahwa

Kunspek ini merupakan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018 lalu.

“Kami bukan hanya melakukan fungsi pengawasan, tapi juga menyerap aspirasi untuk kemajuan Kota Batam karena mempunyai potensi kemampuan aktual dalam memberikan kontribusi kemajuan ekonomi nasional maupun daerah sekitar Batam. Hasil temuan ini akan kami bawa ke Jakarta untuk dibicarakan dengan kementerian dan lembaga terkait,” tutup legislator dapil DKI Jakarta III ini.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Sartono melihat Komisi VI DPR RI perlu mendorong pengelolaan anggaran dan investasi di Batam. Karena dengan posisi Batam yang strategis, maka kecepatan, kecermatan, dan ketepatan pengelolaan BP Batam ini harus terus

dijaga supaya padat karya. “Komisi VI perlu segera memberikan penguatan terhadap hal-hal yang memang menghambat investasi dan investor di Batam ini,” jelas Sartono.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, Komisi VI DPR RI akan terus mencari langkah-langkah alternatif dalam pelayanan dan memajukan pilar pembangunan memajukan ekonomi Batam. “Kami telah meminta kembali BP Batam supaya bisa diberikan suatu otoritas, bisa memutuskan langsung izin-izin investasi untuk dapat diurus satu pintu, dan memberikan kepastian hukum, agar para investor merasa terlindungi dengan investasinya,” jelas politisi dapil Jawa Timur VII ini.

Dalam pertemuan terungkap bahwa penyerapan anggaran BP Batam kurang optimal karena sedang menjalankan Proyek Spesifik “*The Development of Sewerage System*” di Batam, namun kesulitan mendapat kontraktor lokal yang berpengalaman, dimana keputusan-keputusan teknis pengerjaannya juga panjang dan memerlukan waktu. Kemudian anggaran proyek pembangunan Dermaga Curah Kabil yang lama karena pekerjaannya sangat tergantung dengan kondisi iklim (gelombang dan arus angin utara). Dan terakhir, adanya efisiensi belanja PNPB dan adanya penghematan dari sisa pelelangan pekerjaan yang dilelang.

■ gd/sf



Anggota Komisi VI DPR RI Adang Daradjatun memimpin Kunspek Komisi VI DPR RI ke Kepri. Foto: Guntur/HR



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam.  
Foto: Azka/HR

**R**apat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan menghasilkan beberapa

## Komisi VII Usulkan ICP 58 – 63 Dollar AS

perubahan angka yang telah diusulkan oleh pemerintah dalam Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu. Di antaranya yaitu asumsi harga minyak Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP) dan subsidi solar.

“ICP diusulkan di kisaran 58 - 63 dollar Amerika Serikat (AS) per barel. Sementara dalam nota keuangan RAPBN 2020, angka yang ditawarkan adalah sebesar 65 dollar AS per barel,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mohamad Ridwan Hisjam saat memimpin Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, untuk *lifting* minyak bumi ditargetkan 755 ribu barel per hari (bph) dari Nota Keuangan yang diajukan sebanyak 734 ribu bph. Sementara *lifting* gas bumi ditargetkan 1,19 juta Barrels of oil equivalent per day (BOEPD). *Cost recovery* sebesar 8 - 10 miliar dollar AS.

“Volume LPG bersubsidi sebesar 7,5 juta Metrik Ton, naik dibanding tawaran di Nota Keuangan sebesar 7 juta Metrik Ton. Sedangkan subsidi solar dinaikkan menjadi Rp 1500/liter dari sebelumnya Rp 1000/liter. Dan subsidi listrik tetap Rp 62,21 triliun,” papar legislator dapil Jawa Timur V itu.

■ dep/sf

## Pesantren Turut Serta Membidani Lahirnya Indonesia

**K**etua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Marwan Dasopang menyebutkan pesantren turut serta membidani lahirnya Indonesia. Sehingga menurut Marwan dalam RUU tersebut, pesantren harus menanamkan nilai-nilai keindonesiaan.

Hal ini disampaikan Marwan ketika memimpin Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren dan Perwakilan Pesantren Wilayah Indonesia di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/8).

“Dalam sejarah bahwa pesantren turut serta membidani lahirnya Indonesia. Maka dari itu seluruh pesantren harus menanamkan nilai-nilai keindonesiaan. Itu lah yang didefinisi NKRI itu. Kalau tidak menanamkan nilai-nilai keindonesiaan itu bukan pesantren, menurut definisi ini,” kata Marwan.

Marwan menambahkan, dalam sejarah, pesantren turut mengambil bagian bahkan sebelum Indonesia ada. Pesantren juga berandil merumuskan ideologi dan kelembagaan negara. Menurut Marwan, Pesantren sudah menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, sehingga tidak perlu dipertanyakan kemampuannya.

“Dalam sejarah, sebetulnya pesantren jauh sebelum ada

Indonesia, bahkan bertarikh 1500 lembaga pesantren sudah ada. Pesantren ini sudah menghasilkan SDM yang mumpuni juga. Bahkan merumuskan ideologi negara, kelembagaan negara. Maka tidak dipungkiri SDM-nya tidak perlu dipertanyakan mampu atau tidak mampu. Sejarah membuktikan mampu,” kata legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI Adi Putra Darmawan Tahir berpendapat bahwa Undang-Undang ini adalah benteng dalam menghadapi serangan budaya luar karena budaya Indonesia sebagian besar keluar dari pesantren. Menurutnya budaya asli orang Indonesia memiliki ciri khas bertutur kata secara halus dan akibat dampak dari media sosial hal tersebut sudah jarang ditemui.

“Bagaimana budaya ini bisa tetap bertahan dari serangan medsos sekarang yang luar biasa, yang membuat orang kita menjadi kasar, menjadi bicaranya terlalu terus terang. Itu yang bukan budaya kita. Nah makanya dibuatlah Undang-Undang ini supaya budaya Indonesia itu terpelihara,” imbuhi Adi. ■ ger/er



Ketua Panja RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Marwan Dasopang. Foto: Andri/HR

# Pemerintah Harus Terbuka Sampaikan *Roadmap* Pemindahan Ibu Kota

**A**nggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyambut dengan positif niat Presiden memindahkan ibu kota negara. Namun, ia minta Pemerintah secara terbuka menyampaikan *roadmap* atau peta jalan serta anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur ini.

“Presiden menyampaikan anggaran pemindahan sebesar Rp 466 triliun dan 19 persen menggunakan APBN. Seyogyanya, karena ada anggaran yang diambil dari APBN, pemindahan ibu kota ini harus dibahas bersama DPR. Saya berharap pemerintah secara terbuka menyampaikan peta jalan serta berapa sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan,” ungkapnya saat ditemui *Parlementaria* di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).

Legislator F-Golkar ini juga berharap pemerintah memperhatikan dampak dari pemindahan ibu kota ini. Ia menilai tidak hanya berdampak bagi sebuah kawasan, pembangun ibu kota baru tentu berpengaruh bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. “Bagaimana kesiapan masyarakat disana, ini harus diperhatikan.

Pemindahan ibu kota ini juga jangan sampai menghilangkan kearifan lokal baik budaya maupun identitas orang

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah. Foto: Kresno/HR

”

**PEMINDAHAN IBU KOTA INI JUGA JANGAN SAMPAI MENGHILANGKAN KEARIFAN LOKAL BAIK BUDAYA MAUPUN IDENTITAS ORANG KALIMANTAN SENDIRI**

Kalimantan sendiri,” jelasnya.

Ferdi juga menyampaikan dampak lainnya dari pemindahan ibu kota, yaitu di bidang ekonomi dan politik serta kemanan dan ketahanan. “Dengan adanya pemindahan ibu kota ini akan berpengaruh terhadap provinsi lain. Misalnya, orang Aceh ke calon ibu kota menjadi lebih jauh tapi bagi orang Papua lebih dekat. Positifnya adalah pertumbuhan ekonominya, *nah* ini harus diperhatikan,” jelasnya.

Kemudian, di bidang politik, pemindahan ibu kota ini juga akan berdampak pada pemindahan lembaga negara serta partai politik. “Ibu kota baru akan membutuhkan lahan besar, karena otomatis semua lembaga negara juga ikut pindah. Ini harus diperhatikan secara detail. dan jangan sampai pemindahan ini membawa dampak bagi lingkungan,” tukasnya.

Seperti diketahui, pada hari Senin (26/8/2019) lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan lokasi ibu kota baru, yakni Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota baru nantinya akan berada sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. ■ rmm/es



# Karakter Unggul Modal Utama Kemajuan Bangsa

**W**akil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arif Wibowo mengatakan selain mengedepankan kemampuan belajar dan keterampilan, pendidikan Indonesia harus mampu membentuk karakter yang tegas dan berguna bagi bangsa serta berjiwa budi pekerti sehingga menjadi jauh lebih baik.

“Pembangunan karakter dan budi pekerti menjadi modal penting dalam kemajuan pendidikan bangsa, tidak hanya tentang kemampuan dan keterampilan saja,” kata Arif saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di Kantor

Gubernur Provinsi Bali, Denpasar, Senin (26/8).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyampaikan, kualitas pengajar juga menjadi salah satu komponen penting dalam membentuk pribadi yang mumpuni dan unggul di berbagai aspek. “Kualitas pengajarnya juga mempengaruhi dalam membentuk calon penerus bangsa yang unggul,” imbuh Arif.

Legislator dapil Jawa Timur IV ini berpendapat anggaran pendidikan di Indonesia, khususnya Bali pemanfaatannya masih terbatas. Karena fasilitas belajar lebih diutamakan ketimbang kegiatan belajar mengajar itu sendiri.

“Ini kan tentang teknis pengelolaan, harapannya dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang akan kita revisi, pengelolaan anggaran yang masih sangat terbatas, ke depannya menjadi jauh lebih baik. Serta akan fokus terhadap urusan yang penting tidak menyangkut terhadap hal-hal bersifat teknis,” imbuhnya.

Arif berharap, dengan dukungan teknologi yang modern, pendidikan Indonesia harus mengutamakan pembentukan karakter yang tegak dan berbudi luhur serta setia kepada Ideologi Pancasila. “Seperti kata pendahulu kita pendiri bangsa ini, pendidikan harus mengutamakan pembentukan karakter serta setia kepada Ideologi Pancasila, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang jauh lebih baik,” tutup Arif. ■ tn/es



Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI memantau dan meninjau implementasi UU Sistem Pendidikan Nasional di Bali. Foto: Taufan/HR

# Implementasi UU Sisdiknas Harus Perhitungkan Kondisi Lapangan



Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sarmuji. Foto: Arief/HR

**W**akil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sarmuji mengatakan implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di daerah, seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), harus melihat pemetaan kualifikasi secara nasional. Misalnya jangkauan wilayah kepulauan dan daratan harus diperhitungkan dalam desain UU Sisdiknas terutama dalam alokasi anggaran.

“Kualifikasi peringkat pemetaan secara nasional masih di bawah rata-rata nasional, harus ada *treatment* khusus agar bisa sejajar dan seimbang dengan daerah-daerah yang lain agar kualitas sumber daya manusia di NTT menjadi lebih bagus,”

kata Sarmuji usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT beserta jajarannya di Kantor Gubernur NTT, Kupang, Provinsi NTT, Senin (26/8).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, banyak fasilitas sarana dan prasarana sekolah-sekolah di NTT kondisinya cukup memprihatinkan, sehingga harus ada *treatment* khusus pada daerah-daerah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya rendah. Meskipun sudah ditetapkan alokasi anggaran pendidikan di daerah pada angka 20 persen dari APBD, kalau APBD-nya kecil, otomatis anggaran pendidikan jumlahnya juga kecil.

“Yang harus dilakukan negara adalah keberpihakan pada daerah-daerah yang berpendapatan rendah,

”

**YANG HARUS DILAKUKAN NEGARA ADALAH KEBERPIHAKAN PADA DAERAH-DAERAH YANG BERPENDAPATAN RENDAH, SEHINGGA BISA MELAKUKAN MOBILISASI VERTIKAL SEPERTI DAERAH YANG LAIN.**

sehingga bisa melakukan mobilisasi vertikal seperti daerah yang lain. Daerah yang seperti ini harus kita dorong agar mobilitas vertikal nya menjadi cepat sejajar dengan daerah yang lain,” kata Sarmuji.

Penyebaran guru, menurut legislator dapi Jawa Timur VI ini secara nasional sudah tercukupi, tetapi ada keengganan tertentu apabila ditugaskan ke daerah terpencil. Oleh karena itu harus ada insentif yang diberikan agar guru berkenan dan mau ditugaskan ke daerah terpencil terutama daerah kepulauan. “Harus ada insentif yang memadai untuk tenaga pengajar yang ditugaskan, mudah-mudahan jika ada revisi UU, desainnya sudah memperhitungkan hal-hal yang ada di lapangan” tutup Sarmuji. ■ afr/er



# Aturan Turunan UU Sisdiknas Perlu Disinkronisasi

**A**nggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Endang Maria Astuti menilai, aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), baik Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Menteri (Permen), masih saling bertabrakan, sehingga perlu sinkronisasi. Endang menilai, hingga kini salah satu persoalan dalam pelaksanaan UU Sisdiknas adalah alokasi anggaran pendidikan.

Hal itu diungkapkan Endang saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI bertemu dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, civitas akademika Universitas Mulawarman, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, dan Institut Teknologi Kalimantan, dan *stakeholder* lainnya di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (26/8).

“Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini memang masih banyak sekali aturan turunan yang ternyata belum sesuai dengan

harapan. Salah satu amanat yang harus dilakukan (dalam UU) adalah anggaran. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN dan APBD itu mestinya di luar gaji tenaga pendidik. Tapi fakta di daerah, ini *include* (termasuk). Anggaran sebesar 20 persen itu termasuk semuanya,” kata Endang.

Hal lain yang ditekankan politisi Partai Golkar itu adalah mengenai jangka waktu wajib belajar. Menurutnya, jika ingin Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia mampu menghadapi tantangan era globalisasi, maka harus wajib belajar 12 tahun. Selain itu, upaya ini harus mengacu pada konvensi internasional. Di sisi lain, permasalahan zonasi dalam penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga mendapat keluhan, baik dari sekolah maupun orang tua calon murid.

“Ternyata sistem zonasi banyak dikeluhkan masyarakat. Ketersediaan sekolah tidak mencukupi untuk menampung semua calon murid. Dengan diterapkan sistem zonasi, ternyata tolok ukurnya dari kelurahan. Maka banyak orang pandai yang tidak masuk di sekolah tersebut. Akhirnya harus keluar dari calon sekolah pilihan

mereka, dan harus mendaftar ke sekolah swasta. Nah ini yang menjadi keluhan di beberapa provinsi di Indonesia,” imbuh Endang.

Untuk itu, Endang menilai, selain revisi pada UU Sisdiknas, juga perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi pada Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen), agar tidak saling bertabrakan. Perlu ada koordinasi antar kementerian atau lembaga penyelenggara pendidikan dalam membuat aturan turunan dari UU Sisdiknas. Ke depannya, Baleg DPR RI juga berkoordinasi dengan Komisi X DPR RI, sebagai mitra kerja dari Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

Sementara dalam pertemuan terungkap sejumlah permasalahan, baik pada pendidikan tinggi, maupun pendidikan dasar menengah. Wagub Kaltim Hadi Mulyadi menyampaikan, kondisi geografis Kaltim yang sangat luas, sehingga butuh perhatian serius dalam meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Kaltim. Sarana dan prasarana pendidikan di 10 kabupaten kota se-Kaltim juga mendapat perhatian Pemprov Kaltim, karena turut menunjang kegiatan pendidikan. Jika infrastruktur pendidikan tidak baik, tidak ada guru yang mau mengajar di daerah perbatasan.

“Anggaran kami sangat terbatas, APBD cuma Rp 12 triliun, tapi kami tetap semangat membangun Kalimantan Timur. Ada beberapa catatan terkait pendidikan, termasuk perpindahan kewenangan pendidikan SMA dan SMK dari kabupaten kota ke provinsi, ini cukup membuat kewalahan dalam prosesnya. Setahun pertama, sedikit ada kekacauan dalam proses administrasi, insentif, dan lain sebagainya. Insentif untuk guru juga sudah kami tingkatkan, sehingga dapat memberikan motivasi kepada para guru,” papar Wagub Kaltim. ■ sf



Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Endang Maria Astuti dan Wagub Kaltim. Foto: Sofyan/HR

# Banggar Dalam RAPBN 2020



Rapat Kerja Banggar DPR RI dan Pemerintah dipimpin Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir. Foto: Kresno/HR

**B**adan Anggaran (Banggar) DPR RI mulai melakukan pendalaman dan penelaahan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 beserta Nota Keuangannya yang sebelumnya dibacakan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus lalu. Rapat Kerja Banggar DPR RI dan Pemerintah dipimpin Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir.

Turut hadir mewakili Pemerintah, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti. Raker ini dimulai dengan pengesahan rencana jadwal pembahasan antara Panja Pemerintah dengan DPR RI untuk pendalaman RAPBN 2020 ini.

“Pertama kita mengesahkan rancangan jadwal acara RAPBN 2020 sebagaimana kita lihat, dan rancangan itu bersifat fleksibel sesuai perkembangan pembahasan. Hasil

”

**...PEMERINTAH  
MENARGETKAN SEJUMLAH  
INFRASTRUKTUR DASAR  
SUDAH MULAI DIBANGUN  
DI IBU KOTA BARU PADA  
TAHUN DEPAN.**

ini sudah dibahas di rapat internal Banggar,” ujar Kahar di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8). Usulan ini pun dijawab setuju oleh perwakilan Pemerintah.

Setelah pengesahan rancangan jadwal acara, rapat dilanjutkan dengan pembahasan pokok-pokok RAPBN 2020, Anggota Banggar DPR RI lebih banyak mendengar penjelasan dari Menkeu Sri Mulyani. “Setelah pengesahan rancangan jadwal acara, maka acara selanjutnya mendengarkan pemaparan Pemerintah terkait pokok-

pokok RAPBN 2020,” sambung Kahar.

Pendalaman RAPBN 2020 ini dimulai dengan isu pemindahan ibu kota negara. Dalam rapat ini Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa hal itu akan dimasukkan dalam postur anggaran di RAPBN 2020. Namun belum dimasukkan secara keseluruhan yang membutuhkan biaya Rp 466 triliun.

Bambang menyampaikan struktur pembiayaan pemindahan ibu kota berasal dari APBN sebanyak 20 persen. Ia menjelaskan, Pemerintah menargetkan sejumlah infrastruktur dasar sudah mulai dibangun di ibu kota baru pada tahun depan. “Ya baru tahap awal, *kan* targetnya memang tahun depan. Infrastruktur dasar mulai tahun depan,” ucap Bambang.

Pembahasan awal ini mengawali agenda rapat Banggar DPR RI dengan Pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Diharapkan dalam pembahasan ini terjalin sinergi yang baik antara Banggar dengan wakil pemerintah yang ditunjuk dalam pembahasan RAPBN ini.

■ hs/sf

# Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi di Maluku Utara



Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan Amir Uskara. Foto: Tasya/HR

**A**nggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Amir Uskara mengatakan pihaknya hingga kini terus berupaya mempercepat pembahasan dan penyelesaian RUU Daerah Kepulauan. Salah satunya, dengan cara menyerap masukan dari *stakeholder* tak terkecuali di daerah yang bersinggungan langsung dengan RUU ini, seperti halnya dilakukan oleh tim kunspek Pansus RUU Daerah Kepulauan ke Maluku Utara ini.

Hal ini disampaikan Amir Uskara usai memimpin pertemuan tim kunspek Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemkab dan Pemda yang berada di wilayah Maluku Utara, Rektor dan akademisi Universitas Khaerun, serta tokoh masyarakat adat dan tokoh agama, di Ternate, Provinsi Maluku Utara, Senin (26/8).

“Dari apa yang kita dapatkan disini tentu itu jadi masukan-masukan baru

yang mungkin akan menjadi bagian dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan kita bahas bersama pemerintah. Memang kesulitan kita saat ini dari pemerintah sepertinya belum maksimal karena beberapa kali kami undang menteri terkait tapi yang datang rata-rata adalah eselon 1. Kita tentu berharap bisa bicara dengan menternya supaya ini bisa kita tuntaskan,” terang Amir.

Politisi Dapil Sulawesi Selatan I itu berpendapat ada hal krusial yang menjadi catatan penting dalam pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan selama pertemuan tersebut. Yaitu, kewenangan daerah kepulauan dalam pengelolaan sumber daya laut atau perikanan, kemudian perimbangan keuangan. Solusinya adalah usulan dianggarkannya dana khusus daerah kepulauan (DKK) yang dapat dimanfaatkan pemda untuk mengembangkan daerahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“DKK itu di luar daripada dana alokasi khusus untuk DAU maupun

DAK, itu sebenarnya yang kita harapkan. Makanya dalam rancangan kita di RUU ini ada sekitar 5 persen dari dana transfer daerah itu, kita inginkan bisa masuk ke dalam dana khusus untuk kepulauan. Dan itu saya kira sudah cukup mewakili 8 provinsi dan beberapa kabupaten kota yang sementara kita masukan ke dalam daftar daerah kepulauan,” jelas Amir.

Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Ali Yasin Ali antusias atas kedatangan tim kunspek Pansus RUU Daerah Kepulauan ke Maluku Utara untuk menyerap masukan. Ali menjelaskan jika RUU tersebut sudah disahkan, maka daerah kepulauan akan mendapatkan tambahan DAU dari pemerintah pusat yang selama ini komponennya hanya berdasarkan luas wilayah darat ditambah jumlah penduduk saja, ke depannya wilayah laut juga akan diperhitungkan.

“Ya intinya menyangkut dengan luas wilayah laut ini, jika luas laut ditambah tentu DAU nya akan bertambah juga. Artinya bagaimanapun wilayah kepulauan ini kita harapkan ada penambahan-penambahan artinya dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang bukan kepulauan itu memang mereka selama ini kan kayak di Jawa dan Sumatra itu kan daerahnya besar-besar DAU dan DAKnya juga.” ujar Ali

Ali pun berharap RUU yang sudah diwacanakan sejak sepuluh tahun yang lalu ini dapat diselesaikan dan disahkan secepatnya, agar daerah memiliki dana dan kewenangan untuk mengelola sumber daya alamnya sehingga cita-cita untuk menghilangkan disparitas pembangunan antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur dapat terwujud. ■ nap/es

## BAKN Teruskan **Kerja Sama** dengan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi

**K**etua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, BAKN akan terus mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Penelitian di berbagai Perguruan Tinggi termasuk Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung yang kerap memberi masukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAKN DPR RI.

“Kerja sama yang biasa dilakukan antara BAKN dengan Unpad, perguruan tinggi daerah lainnya, bertujuan agar BAKN mendapatkan masukan dari berbagai sudut pandang dalam menjalankan amanat rakyat,” ucap Andreas usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke

Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (23/8).

Sebelumnya, Andreas menjelaskan, BAKN merupakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang baru diaktifkan kembali pada pertengahan 2018.

“Karenanya, kita melakukan pendekatan secara multidimensi, kita ingin melihat suatu kebijakan dalam membelanjakan uang Negara ditinjau dari segala segi,” jelasnya

Menurutnya, hal tersebut dapat menghasilkan *outcome* yang lebih bisa terukur dengan baik dan memenuhi tujuan yang dicapai. “Yang penting bagi kita adalah bagaimana satu rupiah uang yang dibelanjakan itu mempunyai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” terang Andreas.



Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo.  
Foto: Gerald/HR

BAKN DPR RI rutin menggelar sosialisasi terkait tugas dan fungsi BAKN serta menjalin kerjasama dengan berbagai akademisi di berbagai perguruan tinggi. Dengan harapan mendapatkan masukan dalam menjalankan amanat konstitusi. ■ *opi/es*

## DPR Siap **Sambut** Tamu WPFSD

tahunan parlemen itu.

“WPFSD ini memang salah satu ikon dari Parlemen Indonesia dalam rangka mencari dukungan atau menggalang massa untuk menghadapi isu-isu yang berkembang di dunia. Untuk itu kita memang betul menyiapkan ini dari jauh-jauh hari sudah ada perwakilan kita ke Bali guna perizinan dan koordinasi, karena banyaknya tamu negara dunia yang hadir nanti,” jelas Indra kepada **Parlementaria**.

Hal ini ia sampaikan usai membuka agenda rapat koordinasi final persiapan penyelenggaraan WPFSD 2019 di ruang rapat Sekjen, Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8). Ia mendorong agar seluruh pihak pendukung gelaran ini dapat bekerja tanpa celah sehingga para tamu undangan mendapatkan kepuasan selama berada di Bali.

“Ketua Parlemen di setiap negara protokolernya hampir sama setiap kepala negara. Jadi walaupun tidak

menggunakan pesawat khusus, kita harus tetap memberikan pelayanan yang sangat baik. Kita harus buktikan sebagai tuan rumah bahwa Indonesia merupakan negara yang luar biasa dari segala sisinya,” imbuhnya.

Menurutnya secara keseluruhan saat ini persiapan telah selesai, sehingga DPR RI bersama *stakeholder* mulai beralih fokus kepada *rundown* acara. Sementara untuk hal teknis di luar *rundown* menurutnya ini adalah kali ketiga penyelenggaraan forum ini, sehingga ia melihat semua pihak yang terlibat sudah sangat profesional.

WPFSD ketiga dengan tema ‘Combating Inequality Through Social and Financial Conclusion’ akan berlangsung di Provinsi Bali pada 4-5 September mendatang. Setidaknya 25 negara telah mengkonfirmasi akan hadir dalam agenda ini, juga selain itu akan dihadiri oleh Presiden dari *Inter-Parliamentary Union* (IPU) Gabriela Cuevas Barron. ■ *er/sf*



Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Foto: Azka/HR

**S**ekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa DPR RI telah berkoordinasi secara final dengan para *stakeholder* dan siap menyambut tamu, serta mendukung keberlangsungan agenda *World Parliamentary Forum Sustainable Development* (WPFSD) ketiga. Ia meminta seluruh *stakeholder* dapat berkoordinasi dengan baik selama persiapan dan penyelenggaraan forum

# Keterbukaan Parlemen Beri Akses Partisipasi Publik

Implementasi *open parliament* atau keterbukaan parlemen tidak hanya sekedar bertujuan untuk menyediakan data dan informasi, tetapi juga memberikan akses kepada masyarakat agar bisa menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan juga partisipasi publik. Terutama yang berkaitan dengan pembahasan suatu rancangan undang-undang kepada masyarakat.

Demikian hal tersebut dikatakan Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha dalam lokakarya yang mengangkat tema 'Penyusunan Kerangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Parlemen DPR RI', yang diselenggarakan Inspektorat Utama DPR RI di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (23/8).

Totok, sapaan akrab Setyanta menyampaikan, lokakarya yang diselenggarakan oleh Ittama DPR RI yang bekerjasama dengan *The Westminster Foundation for Democracy* (WFD) yakni sebuah lembaga publik independen Kerajaan Inggris, merupakan kelanjutan dari *workshop* yang telah dilakukan 6 bulan yang lalu, yang terkait dengan *open parliament*. "Saat ini kita coba *cover* berbagai *stakeholder* yang ada kaitannya dengan pelaksanaan atau implementasi dari kegiatan keterbukaan parlemen ini," tuturnya.

Selain dari Ittama DPR RI sebagai *leading sector* di dalam melaksanakan *monitoring* dan evaluasi keterbukaan parlemen, sambung Totok, ada pejabat dari unit kerja lain yang juga masuk di dalam penanggung jawab lima rencana aksi maupun aktor yang melaksanakan implementasi dari 5 rencana aksi itu di berbagai unit kerja dan bagian. WFD memberikan dukungan terhadap DPR RI agar dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara transparan dan



Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha. Foto: Azka/HR

akuntabel.

Terkait dengan hal ini, Pimpinan DPR RI memiliki komitmen yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif tersebut. Komitmen tersebut dibuktikan dengan membuat deklarasi "Keterbukaan Parlemen" pada tanggal 29 Agustus 2018 laludengan tujuan membuat pemerintah lebih inklusif, responsif dan akuntabel.

"Menindaklanjuti deklarasi keterbukaan parlemen tersebut, DPR telah menyusun Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Parlemen untuk 2019-2020 dengan lima komitmen, yaitu peningkatan kualitas tata kelola data dan pelayanan informasi legislasi, peningkatan penggunaan teknologi informasi parlemen, penguatan keterbukaan informasi publik DPR RI, penyusunan peta jalan (roadmap) Open Parliament Indonesia, dan penyusunan kelembagaan Open Parliament Indonesia," paparnya.

Totok menegaskan, dari *workshop* ini diharapkan nantinya akan ada *sharing* pemikiran untuk membantu merumuskan *tools* monitoring dan evaluasi. Pada evaluasi inilah peran Ittama dalam ranah *open parliament*. Karena kegiatan *open parliament* ini

sudah disusun rencana aksinya, bahkan sudah ada penanggung jawab komitmen dari 5 rencana aksi itu, termasuk unit-unit dan pejabat-pejabat terkait sebagai aktor yang melaksanakan kegiatan *open parliament*," ungkap Totok.

Dikatakannya, dari lima rencana aksi itu, posisi Ittama DPR RI adalah sebagai *monitoring* dan evaluasi. Itulah kenapa Ittama masuk di dalam kegiatan *open parliament*. "Masukkan dari saya adalah kelembagaan *monitoring* dan evaluasi ini memang semestinya berada diseluruh rencana aksi. Karena sekarang ini hanya tercantum dalam komitmen lima, yaitu pembentukan kelembagaan *open parliament*," ujar Totok.

Totok menyatakan, ke depannya akan ada dua produk hukum yang secara legal berfungsi untuk memayungi dua kegiatan. Satu sisi untuk implementasi keterbukaan parlemen, dan di sisi lain ada tim *monitoring* dan evaluasi. "Di situlah nantinya akan dirumuskan apa yang menjadi tugas-tugas dari keduanya. Hal yang mungkin bisa saya garisbawahi, sebetulnya kita akan bekerja, setelah memiliki *tools* atau alat untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi," pungkasnya. ■ dep/sf

# BKSAP Apresiasi Penerapan RAD SDGs Yogyakarta



Tim Kunjungan Kerja Panja SDGs BKSAP DPR RI bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta jajaran, di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Foto: Sofyan/HR

**P**emerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) DIY 2018-2022 pada tahun 2018 lalu. Sejumlah inovasi dibuat Pemprov DIY guna menerapkan *goals-goals* TPB. Hal ini pun mendapat apresiasi dari Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf.

“Kami cukup senang dan bangga bagaimana Pemprov DIY sudah menerapkan program TPB, yang tercantum dalam RAD 2018-2022. Ini cukup mencengangkan, dimana digambarkan dengan jelas bahwa *goals-goals* dalam TPB itu sudah dikaitkan

dengan program-program Pemprov,” kata Nurhayati usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) SDGs BKSAP DPR RI bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta jajaran, di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (23/8).

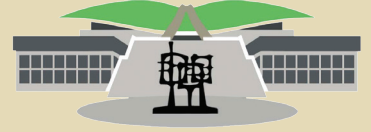
Menurut Ketua Panja SDGs BKSAP DPR RI itu, upaya untuk menerapkan TPB seperti yang dilakukan Pemprov DIY ini perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah lainnya, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten dan kota. Setiap Pemda harus harus memahami konsep TPB dan penerapannya. Pasalnya, TPB bukan suatu konsep yang dari luar datangnya, tapi merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dimana *outcome* yang diharapkan TPB adalah keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

“Sehingga tidak satupun masyarakat Indonesia yang tertinggal. Ini yang membuat kita sangat mengapresiasi dan menghargai Pemprov DIY ini. Kami berharap agar yang seperti ini yang dijadikan contoh. Bahwa ada pemda yang sudah menjalankan, dan memang diterapkan. Walaupun ini masih agenda tahun 2030, dan ada *goals* yang belum tercapai, tapi paling tidak, sudah ada yang mengikuti dengan pola TPB. Apalagi Panja SDGs BKSAP selalu memberikan rekomendasi, baik pada pemerintah, maupun pada DPR sendiri,” jelas politisi F-Demokrat ini.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Sultan Hamengku Buwono menyampaikan, DIY melakukan sejumlah inovasi guna mewujudkan tujuan TPB yang turut menjadi program nasional. Kendati pihaknya sudah meluncurkan sejumlah inovasi, namun ada *goals* dalam TPB yang masih diupayakan untuk segera diselesaikan oleh Pemprov DIY, yakni kemiskinan dan ketimpangan. Menurut Sri Sultan, angka kemiskinan DIY cenderung menunjukkan penurunan. Selain itu, kemiskinan di DIY merupakan anomali yang tidak ditemukan di daerah lain.

“Kemiskinan di DIY tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Seharusnya apabila angka kemiskinan tinggi, angka pendidikan dan kebahagiaan menjadi rendah. Namun DIY tidak, meskipun kemiskinan tinggi dan UMR (Upah Minimum Regional) terendah di Indonesia namun indeks kebahagiaan, harapan hidup, serta pendidikan juga tinggi. Hal ini yang sedang kita kaji,” jelas Sri Sultan sembari mengatakan, dengan berpegang pada Pancamulia, DIY berusaha untuk mewujudkan berbagai *goals* SDGs. ■ sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah, serta sejumlah Anggota DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membuka Pameran Foto Jurnalistik bertajuk "Warna-Warni Parlemen" di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8). Foto: Naefurojie/HR



Pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Setjen MPR RI, dan Setjen DPD RI mengikuti upacara bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 DPR/MPR RI, di halaman Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8). Foto: Arief, Naefurojie/HR





# RANGKAIAN KEGIATAN HUT KE-74 RI dan DPR RI



**7<sup>TH</sup>**  
MENUJU  
INDONESIA  
UNGGUL



**Pameran Foto  
Warna-Warni Parlemen  
29 Agustus 2019**



**Pameran dan Lomba  
Burung Berkicau  
15 September 2019**



**Dangdut Pro Rakyat  
31 Agustus 2019**



**Gowes Sehat  
DPR  
31 Agustus 2019**



**Lomba Menggambar  
dan Mewarnai  
31 Agustus 2019**



**Lomba Panjat  
Bambu Betung  
31 Agustus 2019**



**Lomba Stand Up Comedy  
Penyisihan  
5 September 2019  
Final  
10 September 2019**

